

No. 44988*

**Poland
and
Indonesia**

Protocol on cultural and educational exchanges between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Indonesia for the years 2008-2011. Warsaw, 8 May 2008

Entry into force: *8 May 2008 by signature, in accordance with article 33*

Authentic texts: *English, Indonesian and Polish*

Registration with the Secretariat of the United Nations: *Poland, 10 June 2008*

**Pologne
et
Indonésie**

Protocole relatif à des échanges dans les domaines de la culture et de l'éducation pour les années 2008 à 2011 entre le Gouvernement de la République de Pologne et le Gouvernement de la République d'Indonésie. Varsovie, 8 mai 2008

Entrée en vigueur : *8 mai 2008 par signature, conformément à l'article 33*

Textes authentiques : *anglais, indonésien et polonais*

Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies : *Pologne, 10 juin 2008*

* The texts reproduced below are the original texts of the agreement as submitted. For ease of reference, they were sequentially paginated. Their final UNTS version is not yet available.

Les textes reproduits ci-dessous sont les textes authentiques de l'accord tel que soumises pour l'enregistrement. Pour référence, ils ont été présentés sous forme de la pagination consécutives. Leur version finale RTNU n'est pas encore disponible.

[INDONESIAN TEXT – TEXTE INDONÉSIEN]

**Protokol
tentang Pertukaran Kebudayaan dan Pendidikan
antara Pemerintah Republik Polandia
dan Pemerintah Republik Indonesia
untuk tahun 2008-2011**

Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya disebut “**Para Pihak**”,

BERKEINGINAN untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan persahabatan antara kedua bangsa dengan memperdalam kerjasama di bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, media massa, pemuda dan olahraga;

BERUPAYA untuk mengimplementasikan Persetujuan antara Pemerintah Republik Polandia dan Pemerintah Republik Indonesia di bidang Kerjasama Kebudayaan dan Pendidikan, yang telah dibuat di Warsawa pada tanggal 24 April 2003;

TELAH MENYETUJUI Protokol untuk tahun 2008-2011:

**Bagian I
Kebudayaan dan Kesenian**

Pasal 1

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara masing-masing lembaga kebudayaan.

Pasal 2

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara lembaga Polandia dan Indonesia yang berhubungan dengan kesenian visual kontemporer dalam rangka pengaturan pameran, kunjungan para seniman, kurator, pelestari dan kritikus seni, simposium dan konferensi serta bentuk-bentuk kegiatan sejenis lainnya dalam bidang-bidang tersebut.

Pasal 3

Selama masa berlaku Protokol ini, para Pihak akan mengusahakan pengaturan pameran seni di negara Pihak yang lain, termasuk pameran seni kontemporer. Persyaratan pengaturan pameran dimaksud harus disetujui oleh lembaga-lembaga terkait masing-masing negara.

Pasal 4

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara teater, asosiasi dan lembaga teater Indonesia dan Polandia, terutama yang terkait dengan:

- 1) pertukaran kelompok teater;
- 2) pertukaran spesialis di bidang seni teater (magang, kunjungan studi);
- 3) pertukaran undangan mengunjungi festival teater, simposium, konferensi dan acara teater utama lainnya.

Pasal 5

Selama masa berlaku Protokol ini, para Pihak akan mengadakan pertunjukan teater di negara Pihak yang lain. Penyelenggaranya akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 6

Para Pihak akan mendukung pertukaran solois, kelompok musik dan teater dan partisipasi mereka dalam festival musik dan seni panggung internasional yang diadakan di kedua negara. Penyelenggaranya akan disampaikan melalui saluran diplomatik.

Pasal 7

Para Pihak akan mendukung pertukaran seniman dan kelompok seni rakyat dan partisipasi mereka dalam acara dan festival seni rakyat yang diadakan di negara Pihak lain. Pengaturannya akan dilaksanakan oleh lembaga terkait kedua negara.

Pasal 8

Para Pihak akan mendukung kerjasama antara lembaga dan organisasi yang terkait dengan kegiatan dan seni rakyat amatir.

Pasal 9

1. Para Pihak akan mendukung partisipasi sinematografi negara Pihak lain dalam festival internasional dan pengkajian film yang diadakan di negara mereka.
2. Para Pihak akan mendukung pertukaran film dan pertunjukan televisi komersial dan non-komersial dan akan mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga film dan perusahaan-perusahaan komersial (studio film dan produser film), terutama di bidang produksi bersama film dan pertukaran informasi.

Pasal 10

Para Pihak akan mendukung partisipasi bersama dalam festival dan kompetisi seni yang diadakan di kedua negara, dengan mengirimkan undangan kepada lembaga-lembaga terkait di negara Pihak lain sebulan sebelum penyelenggaraan.

Pasal 11

1. Para Pihak akan mendukung kerjasama perpustakaan nasional kedua negara di bidang pertukaran para ahli, publikasi dan informasi.
2. Para Pihak akan mengupayakan pelaksanaan proyek pendidikan bersama di bidang baca buku, serta kegiatan penerbitan dan perpustakaan. Penyelenggaraan kerjasama dimaksud akan diatur oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 12

Para Pihak akan memprakarsai kerjasama lembaga-lembaga yang terkait dengan promosi pemajuan minat baca dan sastra, mendukung kegiatan penerjemahan dan penerbitan, serta penyelenggaraan pameran buku, dengan tujuan mengintensifkan pertukaran kesusasteraan antara kedua negara.

Pasal 13

Para Pihak akan mendukung kerjasama di bidang menejemen arsip, dengan referensi tertentu untuk menjamin akses terhadap arsip untuk tujuan ilmiah, sosial dan hukum, serta pertukaran ahli, publikasi dan informasi.

Pasal 14

Dalam memenuhi hukum dan persetujuan internasional yang telah ditandatangani oleh kedua negara, para Pihak akan mengupayakan pencegahan impor, ekspor dan transfer secara tidak sah benda-benda yang mengandung warisan budaya kedua negara.

Pasal 15

Para Pihak akan mendukung kerjasama langsung di bidang arkeologi, manajemen museum, pemeliharaan dan perlindungan monumen antara lembaga-lembaga Polandia dan Indonesia yang terkait. Pelaksanaan kerjasama dimaksud akan diatur oleh lembaga-lembaga terkait kedua negara.

Pasal 16

1. Kedua Pihak menyambut pembentukan lembaga kebudayaan masing-masing Pihak di negara Pihak lain.
2. Para Pihak menyetujui prinsip-prinsip penyelenggaraan lembaga tersebut akan diatur dalam pengaturan tertulis secara terpisah.

Bagian II Pendidikan

Pasal 17

Para Pihak akan mendukung kerjasama di bidang pendidikan, dan menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjalinnya hubungan langsung antara semua jenis sekolah dan lembaga pendidikan lainnya, khususnya melalui:

- 1) pertukaran informasi di bidang sistem pendidikan;
- 2) pertukaran pengalaman dan informasi di bidang pelatihan guru;
- 3) pertukaran pelajar dan pelaksanaan program kerjasama.

Pasal 18

1. Para Pihak akan mendukung kerjasama langsung antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian terkait kedua negara di bidang:
 - 1) penelitian bersama;
 - 2) pertukaran fakultas; ahli dan staf manajemen untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan partisipasi dalam seminar dan kongres ilmiah;
 - 3) pertukaran publikasi dan informasi ilmiah.
2. Lembaga-lembaga terkait akan menentukan bidang kerjasama mereka berikut pengaturan pembiayaannya.

Pasal 19

Pihak Polandia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan bagi 2 (dua) orang untuk belajar di universitas atau magang selama 9 (sembilan) bulan kepada Pihak Indonesia.

Pasal 20

1. Pihak Indonesia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan bagi 2 (dua) orang untuk belajar atau magang selama 9 (sembilan) bulan kepada Pihak Polandia.
2. Pihak Indonesia setiap tahunnya akan memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada 20 (duapuluh) orang mahasiswa Polandia untuk berpartisipasi dalam program Darmasiswa untuk mempelajari bahasa, kebudayaan dan kesenian Indonesia.

Pasal 21

Pihak Indonesia akan mendukung prakarsa yang dilakukan oleh badan-badan berkompeten perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kursus bahasa Polandia.

Pasal 22

Pihak Polandia akan mendukung prakarsa yang dilakukan oleh badan-badan berkompeten perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kursus bahasa Indonesia.

Pasal 23

Para Pihak akan mendukung perkembangan hubungan dan kerjasama kepemudaan, dan mendorong kerjasama antara organisasi pemuda dan lembaga kepemudaan di kedua negara.

Pasal 24

Kementerian dan lembaga pendidikan terkait kedua Pihak dapat menetapkan program eksekutif tentang kerjasama langsung dan pelaksanaannya, yang menentukan ruang lingkup dan bentuk serta penyelenggaraan dan pengaturan pembiayaan pertukaran tersebut.

Bagian III Kerjasama Bidang Lainnya

Pasal 25

Para Pihak akan mendukung perkembangan hubungan dan kerjasama di bidang olahraga dan mendorong kolaborasi antara federasi dan asosiasi olahraga, serta klub olahraga.

Pasal 26

1. Para Pihak akan memfasilitasi pembentukan hubungan bilateral antara televisi dan pemancar radio publik kedua negara.
2. Para Pihak akan mendukung pertukaran film komersial dan non-komersial serta acara televisi.

Pasal 27

Para Pihak akan mendukung kerjasama dalam kerangka United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), dan dalam tingkat bilateral, kerjasama langsung antara komite nasional kedua negara dalam UNESCO.

**Bagian IV
Pertukaran Orang**

Pasal 28

Pertukaran orang dalam Protokol ini akan dilaksanakan dalam kerangka pendidikan, magang penelitian dan kunjungan jangka pendek di tingkat universitas.

Pasal 29

1. Kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam pertukaran yang disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Protokol ini, Para Pihak akan menyediakan hal-hal berikut:

Pihak Penerima:

- 1). Pendidikan bebas uang kuliah di perguruan tinggi dan lembaga penelitian tanpa pembayaran beasiswa;
- 2). Menyediakan akomodasi yang dibayar.

Pihak Pengirim:

- 1). Pembayaran beasiswa untuk biaya tempat tinggal;
 - 2). Membayar biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan, termasuk biaya perawatan di rumah sakit dan biaya transportasi medis, kecuali bila negara penerima memiliki peraturan untuk memberikan hak perawatan kesehatan tersebut berdasarkan ketentuan negara penerima.
2. Dokumen para calon untuk pendidikan universitas dan kegiatan magang penelitian disampaikan melalui saluran diplomatik negara penerima dengan tenggat waktu yang telah disetujui oleh para Pihak.

**Bagian V
Ketentuan Umum dan Penutup**

Pasal 30

Protokol ini tidak menutup kemungkinan adanya bentuk kerjasama lain di bidang kebudayaan dan pendidikan, dengan ketentuan bahwa kerjasama tersebut telah disepakati dan disampaikan melalui saluran diplomatik.

Pasal 31

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan Protokol ini akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik antara para Pihak.

Pasal 32

Protokol ini dapat diubah, jika dipandang perlu, berdasarkan kesepakatan tertulis para Pihak melalui saluran diplomatik.

Pasal 33

Protokol ini mulai berlaku pada hari penandatanganan dan akan tetap berlaku hingga tanggal 31 Desember 2011.

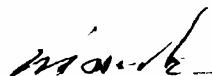
Protokol ini berlaku sampai berlakunya Protokol baru, tetapi tidak melewati dari 31 Desember 2012.

Dibuat di ~~Szczecin~~ pada 8 Mei 2008, dalam rangkap 2, dalam bahasa Polandia, Indonesia dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan yang sama. Dalam hal perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

PEMERINTAH
REPUBLIK POLANDIA



PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA



[POLISH TEXT – TEXTE POLONAIS]

**Porozumienie
w sprawie wymiany kulturalnej i edukacyjnej
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rządem Republiki Indonezji
na lata 2008-2011**

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rząd Republiki Indonezji, zwane dalej „Stronami”,

pragnąc rozwijać i umacniać przyjazne stosunki między obu narodami poprzez pogłębianie współpracy w dziedzinie kultury, sztuki, edukacji, mediów, młodzieży i sportu,

w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indonezji o współpracy kulturalno-edukacyjnej, sporządzonej w Warszawie dnia 24 kwietnia 2003 roku,

uzgodniły następujące Porozumienie na lata 2008 - 2011:

I. Kultura i sztuka

Artykuł 1

Strony będą popierać współpracę między instytucjami kultury.

Artykuł 2

Strony będą popierać współpracę między polskimi i indonezyjskimi instytucjami zajmującymi się współczesnymi sztukami wizualnymi w zakresie organizacji wystaw, pobytów artystów, kuratorów, konserwatorów i krytyków sztuki, sympozjów oraz konferencji i innych form działalności w tej dziedzinie.

Artykuł 3

W okresie obowiązywania Porozumienia Strony będą dążyć do organizowania w kraju partnera wystaw artystycznych, w tym wystaw sztuki współczesnej. Warunki zorganizowania wystaw zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 4

Strony będą popierać współpracę między polskimi i indonezyjskimi teatrami, stowarzyszeniami i instytucjami teatralnymi, w szczególności w zakresie:

- 1) wymiany zespołów teatralnych;
- 2) wymiany specjalistów w dziedzinie sztuki teatralnej (staże, pobuty studyjne);
- 3) wymiany zaproszeń na festiwale teatralne, sympozja oraz konferencje i inne znaczące wydarzenia teatralne.

Artykuł 5

W okresie obowiązywania Porozumienia Strony będą dążyć do prezentacji w kraju partnera spektakli teatralnych. Warunki zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 6

Strony będą popierać wymianę solistów, zespołów muzycznych i teatralnych oraz ich udział w międzynarodowych imprezach muzyczno-scenicznych, które będą organizowane w obu państwach. Szczegóły zostaną uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł 7

Strony będą popierać wymianę twórców ludowych i zespołów folklorystycznych oraz ich udział w międzynarodowych imprezach i festiwalach folkloru, organizowanych w kraju partnera. Warunki zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 8

Strony będą popierać współpracę instytucji i organizacji związanych z ruchem amatorskim i sztuką ludową.

Artykuł 9

1. Strony będą popierać udział kinematografii kraju partnera w międzynarodowych festiwalach i przeglądach filmów organizowanych w swoich krajach.
2. Strony będą popierać komercyjną i niekomercyjną wymianę filmów i audycji telewizyjnych oraz wspierać współpracę między instytucjami filmowymi i firmami komercyjnymi (studiami filmowymi i producentami filmowymi), szczególnie w zakresie koprodukcji filmowej i wymiany informacji.

Artykuł 10

Strony będą popierać wzajemny udział w festiwalach i konkursach artystycznych organizowanych w obu krajach, kierując zaproszenia do odpowiednich instytucji w kraju partnera z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

Artykuł 11

1. Strony będą popierać współpracę bibliotek narodowych obu krajów w zakresie wymiany ekspertów, a także publikacji i informacji.
2. Strony będą dążyć do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa książek oraz działalności wydawniczej i bibliotecznej. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu krajów.

Artykuł 12

Strony będą popierać współpracę instytucji zajmujących się promocją czytelnictwa i literatury, wspieraniem działań tłumaczy i wydawców, a także organizacją targów książki, w celu zintensyfikowania wymiany literackiej między obu państwami.

Artykuł 13

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie dostępu do archiwów dla celów naukowych, społecznych i prawnych, wymiany ekspertów, publikacji i informacji.

Artykuł 14

Strony będą dążyć, zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, a także zgodnie z podpisanymi przez obie Strony umowami międzynarodowymi, do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturalne.

Artykuł 15

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków między zainteresowanymi instytucjami polskimi i indonezyjskimi. Warunki współpracy zostaną uzgodnione między zainteresowanymi instytucjami obu państw.

Artykuł 16

1. Obie Strony przyjmą z zadowoleniem otwarcie instytucji kulturalnej każdej ze Stron w kraju partnera.
2. Strony uzgadniają, że zasady działania tej instytucji zostaną ustalone w odrębnym pisemnym porozumieniu.

II. Edukacja

Artykuł 17

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie oświaty, a także stwarzać odpowiednie warunki do bezpośrednich kontaktów między szkołami wszystkich typów i innymi placówkami funkcjonującymi w systemie oświaty, w szczególności sprzyjając:

- 1) wymianie informacji na temat systemów oświaty;
- 2) wymianie doświadczeń i informacji w zakresie kształcenia nauczycieli;
- 3) wymianie uczniów i realizacji programów współpracy.

Artykuł 18

1. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i innymi zainteresowanymi jednostkami naukowymi obu krajów w zakresie:
 - 1) wspólnych badań naukowych;
 - 2) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych, ekspertów i kadry zarządzającej w celu poprawy poziomu szkolnictwa wyższego oraz udziału w seminariach i kongresach naukowych;
 - 3) wymiany publikacji naukowych i informacji.
2. Zainteresowane instytucje uzgodnią dziedziny współpracy oraz warunki finansowe.

Artykuł 19

Strona polska przyzna rocznie Stronie indonezyjskiej łącznie 2 miejsca na studia lub 9-miesięczne staże naukowe.

Artykuł 20

1. Strona indonezyjska przyzna rocznie Stronie polskiej łącznie 2 miejsca na studia lub 9-miesięczne staże naukowe.
2. Strona indonezyjska przyzna polskim studentom pragnącym uczyć się języka, kultury i sztuki Indonezji do 20 miejsc rocznie w ramach Programu Darmasiswa.

Artykuł 21

Strona indonezyjska będzie popierać inicjatywy podejmowane przez właściwe organy szkół wyższych mające na celu zorganizowanie lektoratu języka polskiego.

Artykuł 22

Strona polska będzie popierać inicjatywy podejmowane przez właściwe organy szkół wyższych mające na celu zorganizowanie lektoratu języka indonezyjskiego.

Artykuł 23

Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę młodzieży, a także wspierać współpracę między organizacjami młodzieżowymi oraz instytucjami zajmującymi się młodzieżą w obu krajach.

Artykuł 24

Zainteresowani ministrowie i instytucje edukacyjne obu Stron będą mogli zawierać porozumienia o bezpośredniej współpracy oraz programy wykonawcze, określające zakres, formy oraz warunki organizacyjne i finansowe wymiany.

III. Inne dziedziny współpracy

Artykuł 25

Strony będą popierać rozwój kontaktów i współpracę w dziedzinie sportu, a także wspierać współpracę między federacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi.

Artykuł 26

1. Strony będą sprzyjać nawiązaniu dwustronnych kontaktów między telewizjami oraz radiofoniami publicznymi obu krajów.
2. Strony będą popierać komercyjną i niekomercyjną wymianę filmów i audycji telewizyjnych.

Artykuł 27

Strony będą popierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz na poziomie bilateralnym bezpośrednią współpracę między swoimi komitetami narodowymi UNESCO.

IV. Warunki wymiany osobowej

Artykuł 28

Wymiana osobowa na podstawie niniejszego Porozumienia będzie się odbywała w ramach studiów, staży naukowych oraz wizyt krótkoterminowych.

Artykuł 29

1. Osobom uczestniczącym w wymianie na podstawie artykułów 19 i 20 niniejszego Porozumienia Strony zapewniają:

Strona przyjmująca:

- 1) bezpłatną naukę w publicznych szkołach wyższych oraz jednostkach naukowych, bez wypłaty świadczeń stypendialnych;
- 2) odpłatne zakwaterowanie.

Strona wysyłająca:

- 1) wypłatę świadczeń stypendialnych obejmujących koszty zakwaterowania i utrzymania;
- 2) ubezpieczenie na wypadek nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, obejmujące koszty pobytu w szpitalu i koszty transportu medycznego, chyba że prawo do świadczeń zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmującego.

2. Dokumenty kandydatów na studia oraz staże naukowe będą przekazywane drogą dyplomatyczną, w uzgodnionych przez obie Strony terminach.

V. Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł 30

Porozumienie nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie kultury i edukacji, pod warunkiem uzgodnienia ich drogą dyplomatyczną.

Artykuł 31

Wszelkie kwestie sporne lub różnice interpretacji bądź stosowania niniejszego Porozumienia będą rozwiązywane w duchu przyjaźni, w drodze konsultacji lub negocjacji drogą dyplomatyczną między obu Stronami.

Artykuł 32

Jeśli zajdzie taka potrzeba, niniejsze Porozumienie może zostać zmienione, za zgodą obu Stron, drogą dyplomatyczną.

Artykuł 33

Porozumienie wejdzie w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywało do dnia 31 grudnia 2011 roku.

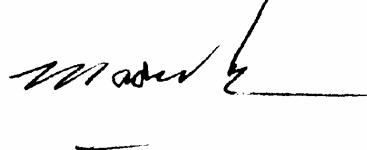
Porozumienie będzie stosowane do dnia wejścia w życie nowego Porozumienia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Podpisano w Warszawie, dnia 8 maja 2008, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach: polskim, indonezyjskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst angielski będzie uważany za rozstrzygający.

**Z upoważnienia Rządu
Rzeczypospolitej Polskiej**



**Z upoważnienia Rządu
Republiki Indonezji**



[ENGLISH TEXT – TEXTE ANGLAIS]

**Protocol
on Cultural and Educational Exchanges
between
the Government of the Republic of Poland
and the Government of the Republic of Indonesia
for the Years 2008-2011**

The Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "the Parties":

DESIRING to develop and strengthen the relations of friendship between the two peoples by deepening their co-operation in the fields of culture, arts, education, mass media, youth and sports;

SEEKING to implement the Agreement between the Government of the Republic of Poland and the Government of the Republic of Indonesia on Cultural and Educational Co-operation, done at Warsaw on April 24, 2003;

HAVE AGREED the following Protocol for the years 2008 – 2011:

Part I. Culture and Arts

Article 1

The Parties shall support co-operation between their cultural institutions.

Article 2

The Parties shall support co-operation between Polish and Indonesian institutions concerned with contemporary visual arts in the organisation of exhibitions, visits by artists, curators, conservators and art critics, symposia and conferences, as well as other forms of activity in this sphere.

Article 3

During the period of validity of this Protocol, the Parties shall seek to organise arts exhibitions in the country of the other Party, including exhibitions of contemporary art. The terms of organising such exhibitions shall be agreed by the interested institutions of the two states.

Article 4

The Parties shall support co-operation between Polish and Indonesian theatres, associations and theatre institutions, particularly with regard to:

- 1) exchange of theatre companies;
- 2) exchange of specialists in the field of theatre art (internships, study visits);
- 3) exchange of invitations to theatre festivals, symposia, conferences and other major theatre events.

Article 5

During the period of validity of this Protocol, the Parties shall strive to present theatre spectacles in the country of the other Party. The particulars shall be elaborated by the interested institutions of the two states.

Article 6

The Parties shall support exchange of soloists, music and theatre ensembles and their participation in international musical and stage performances organised in the two states. The particulars shall be elaborated through diplomatic channels.

Article 7

The Parties shall support exchange of folk artists and groups and their participation in international folk events and festivals organised in the country of the other Party. The particulars shall be elaborated by the interested institutions of the two states.

Article 8

The Parties shall support co-operation between institutions and organisations connected with the amateur movement and folk art.

Article 9

1. The Parties shall support the participation of the cinematography of the country of the other Party in international festivals and film reviews organised in their countries.

2. The Parties shall support commercial and non-commercial exchange of films and television shows and shall encourage co-operation between film institutions and commercial enterprises (film studios and film producers), particularly in the area of film co-production and exchange of information.

Article 10

The Parties shall support mutual participation in arts festivals and competitions organised in the two countries, extending invitations to the relevant institutions in the country of the other Party at least one month in advance.

Article 11

1. The Parties shall support co-operation of the national libraries of the two countries in the area of exchange of experts, publications and information.
2. The Parties shall strive to implement joint educational projects in the sphere of readership of books, as well as publishing and library activities. The particulars of such co-operation shall be elaborated by the interested institutions of the two countries.

Article 12

The Parties shall stimulate the co-operation of institutions involved in the promotion of readership and literature, support for the activity of translators and publishers, as well as organisation of book fairs, with the aim of intensifying the literary exchange between the two states.

Article 13

The Parties shall support co-operation in the field of archives management, with particular reference to ensuring access to archives for scientific, social and legal purposes, as well as exchange of experts, publications and information.

Article 14

In compliance with their laws and international agreements they have signed, the Parties shall strive to prevent illicit import, export and transfer of cultural goods constituting their cultural heritage.

Article 15

The Parties shall support direct co-operation in the field of archaeology, museum management, conservation and protection of monuments between the interested Polish and Indonesian institutions. The particulars of such co-operation shall be elaborated by the interested institutions of the two states.

Article 16

1. Both Parties will welcome the establishment of a cultural institution of each Party in the country of the other Party.
2. The Parties hereby agree that the principles of operation of the institution will be elaborated in a separate written arrangement.

Part II. Education

Article 17

The Parties shall support co-operation in the field of education, and also create conducive conditions for direct contacts between schools of all types and other institutions within the system of education, in particular by encouraging:

- 1) exchange of information on the systems of education;
- 2) exchange of experience and information relating to teacher training;
- 3) student exchange and implementation of co-operation programs.

Article 18

1. The Parties shall support direct co-operation between higher schools and other interested research institutions of the two countries in the field of:
 - 1) joint research;
 - 2) exchange of faculty, experts and management staff for quality improvement of higher education and participating in scientific seminars and congresses;
 - 3) exchange of scientific publications and information.
2. The interested institutions shall determine the areas of their co-operation and its financial terms.

Article 19

The Polish Party shall annually grant to the Indonesian Party a total of two places for university studies or for 9-month research internships.

Article 20

1. The Indonesian Party shall annually grant to the Polish Party a total of two places for university studies or for 9-month research internships.
2. The Indonesian Party shall annually grant maximum 20 places for Polish students to participate in the Darmasiswa Program to study the Indonesian language, culture and arts.

Article 21

The Indonesian Party shall support initiatives being undertaken by the competent organs of higher schools for the purpose of organising a Polish language course.

Article 22

The Polish Party shall support initiatives being undertaken by the competent organs of higher schools for the purpose of organising an Indonesian language course.

Article 23

The Parties shall support the development of youth contacts and co-operation, and shall encourage co-operation between youth organisations and institutions concerned with youth in both countries.

Article 24

The interested ministers and educational institutions of both Parties may conclude executive programs on direct co-operation and implementation, determining the scope and forms as well as organisational and financial terms of exchanges.

Part III. Other Fields of Co-operation

Article 25

The Parties shall support the development of contacts and co-operation in the field of sports and shall encourage collaboration between sports federations, associations and sports clubs.

Article 26

1. The Parties shall facilitate the establishment of bilateral contacts between public television and radio broadcasters of both countries.
2. The Parties shall support commercial and non-commercial exchange of films and television shows.

Article 27

The Parties shall support co-operation within the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), and on a bilateral level, direct co-operation between their national committees of UNESCO.

Part IV. Exchange of Persons

Article 28

The exchange of persons under this Protocol shall take place in the framework of university studies, research internships and short-term visits.

Article 29

1. The Parties shall provide the following to persons taking part in exchanges pursuant to Article 19 and 20 of this Protocol:

The Receiving Party:

- 1) tuition-free education in higher public schools and research institutions, without payment of scholarships;
- 2) payable accommodation.

The Sending Party:

- 1) payment of scholarships to cover the costs of room and board;
- 2) health and accident insurance covering hospital treatment and cost of medical transport, unless the right to health care is provided under the regulations of the receiving state.

2. Documents of the candidates for university studies and research internships shall be conveyed by the diplomatic channels of the receiving state, within deadlines agreed by the Parties.

Part V. General and Final Provisions

Article 30

This Protocol shall not preclude the possibility of other forms of co-operation in the fields of culture and education, on the condition that such co-operation is agreed through diplomatic channels.

Article 31

Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Protocol shall be settled amicably through consultations or negotiations through diplomatic channels between the Parties.

Article 32

This Protocol may be amended, if it is deemed necessary, by mutual consent in writing between the Parties through diplomatic channels.

Article 33

This Protocol shall enter into force on the day of its signing and shall remain in force until December 31, 2011.

This Protocol shall be applied until entry into force of a new Protocol, but not later than December 31, 2012.

Done at Warsaw , this 8th day of May 2009 in duplicate, each in the Polish, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In the event of differences in their interpretation, the English text shall prevail.

**For the Government
of the Republic of Poland**



**For the Government
of the Republic of Indonesia**

